

ABSTRAK

Judul :Kebijakan Amir Sjarifuddin Terhadap Angkatan Perang Tahun 1946-1948.

Oleh : Y. Anjar Triantara

Permasalahan yang dibahas antara lain : faktor-faktor pendorong berdirinya angkatan perang , perkembangan angkatan perang pada masa pemerintahan Amir Sjarifuddin pada tahun 1946-1948, dan bentuk konkret kebijakan Amir Sjarifuddin. Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan tentang angkatan perang yang muncul akibat dari kolonialisme dan fasisme, setelah Amir Sjarifuddin menjabat menjadi menteri pertahanan maka akan di alihkan fungsikan dan tujuannya menjadi tentara berorientasi revolusioner.

Metode penulisan menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah, maka ada beberapa langkah yaitu : pemilihan subyek, pengumpulan sumber, kritik sumber, analisis data, dan penulisan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Politik dan social. Penulisan ini menggunakan metode deskripti analisis.

Kebijakan Amir Sjarifuddin terhadap angkatan perang adalah suatu bentuk dari indoktrinasi politik, sebab langkah tersebut berguna untuk menguasai nilai-nilai keamanan dan pertahanan negara. Langkah yang dilakukan Amir, merupakan usahanya supaya dapat menghilangkan unsur fasisme Jepang dalam diri tentara rakyat. Pembentukan Pepolit dalam badan pendidikan yaitu untuk memberikan bekal tentara tentang bagaimana mereka bisa loyal terhadap pemerintah dan tidak bertindak sendiri tanpa ada perintah dari pusat.

Amir Sjarifuddin adalah tokoh yang sangat menentang nilai-nilai fasisme Jepang , sebab pernah merasakan sendiri menjadi tawanan Jepang pada waktu itu. Rasa benci yang begitu dalam akan diwujudkan setelah ia menjadi menteri pertahanan, dan memberikan konsepsi menyangkut ketentaraan supaya ditanamkan pada aspek pertahanan dan keamanan. Maka banyak sekali masalah-masalah yang dihadapinya semasa menjabat menteri. Usaha yang dilakukannya untuk mengabungkan antara pamerintah dengan tentara dan tidak ada perbedaan dalam berpolitik serta bertanggung jawab dengan badan pekerja dan KNIP, karena mendapat mandat dari Presiden Soekarno, saat pemerintahan dalam keadaan kacau.

ABSTRACT

Title ; The Amir Sjarifuddin's policy of armed forces in 1946 until 1948.
By : Y. Anjar Triantara.

The problems that discussed for example : supporting factors the formed of armed forces, the growth of armed forces on the governance of Amir Sjarifuddin in 1946-1948, and the concrete form of Amir Sjarifuddin's policy. This writing target to describe about armed forces which appear because the effect of colonialism and fascism, after Amir Sjarifuddin become a Minister of Defender it will be displaced function and the target is become the army orient revolutionary.

The writing method is using the history method, it is a process to test and analyze the critically record and an old world omission, to produce a history article, so there are some steps they are : subject election, gathering sources, criticize the source, analyze the data, and writing. The approach that used is political and social approach. This writing is use the analyze description method.

Amir Sjarifuddin's policy of armed forces is a from of political endocrines. Because, the step is use to master defence and security values state. The step that conducted by Amir, is representing his effort to eliminate the element of Japan fascism on people military. Forming Pepolit in education institute is to give the military's knowledge how they loyal to the government and do not take any actions without order from the center.

Amir Sjarifuddin is a figure who opposing the values of Japan fascism, because he has felt become the Japan captive in the past. The deep hates will realize after he become a Minister of Defence, and give the conception concerning to army that inculcated on defence and security aspect. So there are a lot of problems that faced when he become a Minister of Defence. The effort that he does is joining the government with military and there is not a difference in politic and responsibility with labour institute and KNIP, because getting mandate from President Soekarno, when the governance in disorder condition.